



Informasi Strategis

Sabtu, 10 Oktober 2020

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14



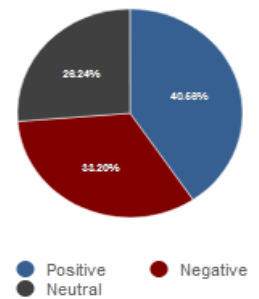
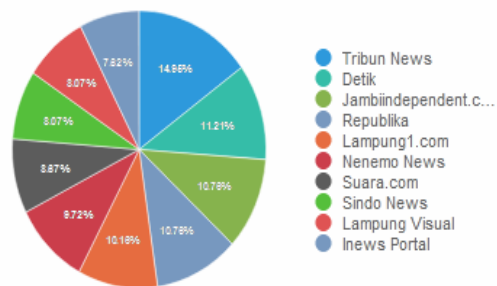
ANCAMAN PENCURIAN KEKAYAAN SUMBER ALAM

TNI AL KEMBALI TANGKAP KAPAL IKAN BERBENDERA VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA

Pada tanggal 9 Oktober 2020 di Jakarta, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada I Laksma TNI Dato Rusman dalam keterangannya menjelaskan KRI John Lie-358 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I yang sedang melaksanakan patroli rutin di Perairan Laut Natuna Utara, kembali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) yang didapati melakukan kegiatan *illegal fishing*, di Perairan Landas Kontinen Indonesia.



EXPOSURE	
4.893 Berita Lokal – nasional	
387.958 Mention Media Sosial	
DAMPAK	
Politik	hubungan bilateral Merenggang
Ekonomi	Menurunnya hasil tangkapan Ikan
Sosial	Persaingan nelayan lokal dan asing
Militer	Ancaman terhadap kedaulatan NKRI



FASILITAS KEMHAN / TNI
KOGABWILHAN I TANJUNG PINANG KEPRI
KODAM I/ BUKIT BARISAN
GUSPURLA KOMARMADA I
YONLANTAMAL IV TANJUNGPINANG

IMPLIKASI RISIKO

Kapal Ikan Asing (KIA) yang memasuki wilayah Perairan Landas Kontinen Indonesia dan mencuri sumber kekayaan laut Indonesia tanpa ijin merupakan pelanggaran batas ZEEI, bila hal tersebut terus dilakukan dan tidak adanya tindakan tegas dari TNI dan Bakamla, maka dikhawatirkan akan diikuti oleh negara-negara asing lainnya yang dapat berakibat timbulnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

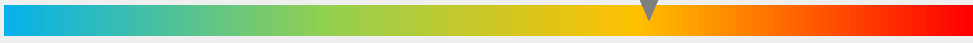
Peningkatan Kehadiran KIA Vietnam di Laut Natuna Utara

Indonesia dan Vietnam masih memiliki klaim perbatasan maritim ZEE yang tumpang tindih, terutama di sekitar perairan Kepulauan Natuna dan utara Kalimantan.

Pelaksanaan penjagaan keamanan laut pada wilayah *Unresolved Maritime Boundary Area* di Laut Natuna Utara oleh TNI dan *stakeholder* terkait masih belum terselenggara secara sinergis.

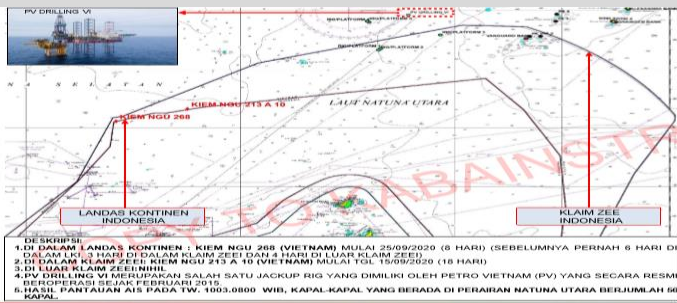
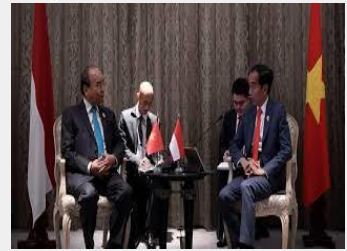
INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA



IMPLIKASI POLITIK	IMPLIKASI SOSIAL	IMPLIKASI EKONOMI	IMPLIKASI HUKUM	IMPLIKASI HANKAM
BERDAMPAK LANGSUNG	BERDAMPAK LANGSUNG	BERDAMPAK LANGSUNG	BERDAMPAK LANGSUNG	BERDAMPAK LANGSUNG

SENTIMEN PUBLIK



IMPLIKASI RISIKO

Diperlukan percepatan pembahasan negoisasi batas maritim Indonesia-Vietnam sehingga dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas Laut China Selatan.

AS Blokir Iran dari Sistem Keuangan Global

Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Langkah tersebut secara efektif akan menutup Teheran dari sistem keuangan global. Dalam pengumumannya, Departemen Keuangan AS menyatakan telah memasukkan 18 bank besar Iran ke dalam daftar hitam. Sebanyak 16 bank dibidik karena beroperasi di sektor keuangan Iran. Satu bank menjadi target karena dikendalikan oleh bank Iran lainnya yang terlebih dulu dijatuhi sanksi. Sementara satu bank sisanya terafiliasi dengan militer Iran.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI SOSIAL

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI EKONOMI

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HUKUM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG



IMPLIKASI RISIKO

Departemen Keuangan AS menyatakan telah mengidentifikasi sektor keuangan ekonomi Iran sebagai jalan tambahan yang mendanai kegiatan jahat Pemerintah Iran. Jika AS tidak melakukan pemblokiran terhadap sistem keuangan Iran maka Iran akan leluasa mendanai kelompok-kelompok perlawanan anti AS dan juga Israel. Tindakan ini adalah kebijakan AS untuk menghambat Iran melakukan perlawanan melalui mekanisme non militer.

Dinamika Omnibus Law di Medsos

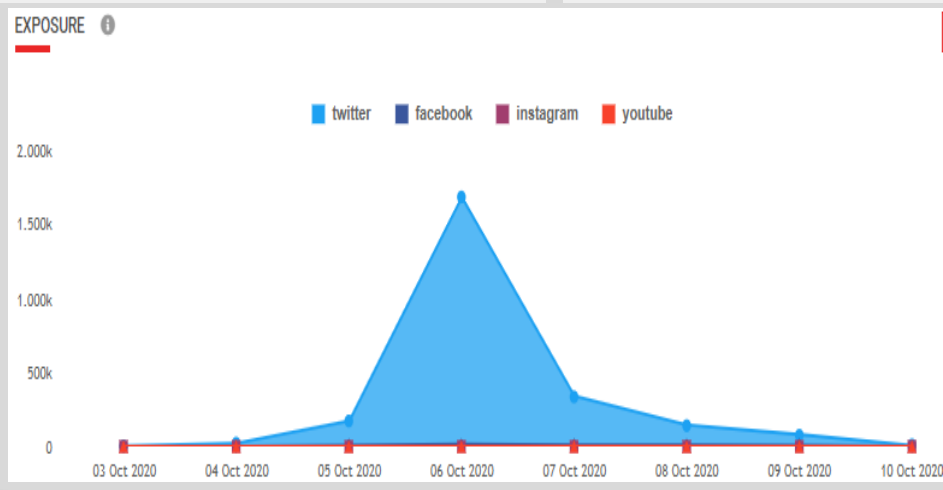
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan aksi mogok nasional penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berakhir. Setelah mogok nasional yang dilakukan KSPI dan 32 serikat buruh yang digelar pada 6, 7, dan 8 Oktober 2020, selanjutnya, KSPI akan mengalihkan konsentrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Berdasarkan data Intelligence Socio Analytics (ISA) s.d. Sabtu, 10 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB, melalui pengamatan seminggu terakhir, dinamika isu Omnibus Law sudah menurun setelah mengalami puncaknya pada 6 Oktober 2020, khususnya di *platform* media sosial Twitter.

EXPOSURE ISU OMNIBUS LAW				
Category	twitter	facebook	instagram	youtube
03 Oct 2020	2942	272	72	10
04 Oct 2020	20161	1855	246	24
05 Oct 2020	164343	5729	816	77
06 Oct 2020	1661516	13184	1369	206
07 Oct 2020	329472	7245	1400	270
08 Oct 2020	134500	8006	1945	485
09 Oct 2020	72058	6123	1859	412
10 Oct 2020	6444	279	57	20

LEVEL ANCAMAN ISU ANCAMAN PERANG *MINDSET* DI MEDSOS DALAM NEGERI



LEVEL ANCAMAN ISU ANCAMAN PERANG *MINDSET* DI MEDSOS LUAR NEGERI



- STAKEHOLDER TERKAIT
- PEMERINTAH
- BURUH
- INVESTOR

IMPLIKASI RISIKO

Pemerintah disebut tidak akan mencegah orang-orang yang kontra terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Karena hal ini lebih baik, daripada menggerakkan massa dalam jumlah besar yang akhirnya tidak terkontrol dan bertindak anarkis. Jika demo anarkis tetap dipilih sebagai sarana menyampaikan kebebasan berpendapat, maka dampaknya investor akan enggan melakukan investasi di Indonesia, yang berakibat kurangnya lapangan kerja.